



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 2471-2482

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Upaya Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Nourma Ulva^{1✉}, Syarla Fian², Rizky Hidayatullah³, Januar Amrullah⁴, Adinda Putri⁵, Khoirul
Ulum⁶, Badrus Samsih⁷ Tidar Astono⁸
Universitas Panca Marga Probolinggo
Email : nourmaulva@upm.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi Pemerintah Probolinggo dalam menata Pemerintah Kota Probolinggo dalam menata dan mengelola para Pedagang yang berada di Jalan Suroyo Kota Probolinggo. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil berupa narasi yang didapat dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi, tanpa menggunakan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan untuk menciptakan ketertiban di kawasan Jalan Suroyo, yang merupakan wilayah dengan penegakan hukum dan lalu lintas yang tertib. Setiap individu, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan mematuhi aturan yang berlaku. Adapun respon PKL terhadap kebijakan ini cukup positif, sebagaimana terlihat dari adanya komitmen bersama yang dituangkan dalam Deklarasi Pedagang Sentra Angkringan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam menata dan mengelola ketertiban PKL di Jalan Suroyo dinilai cukup berhasil.

Kata Kunci : *PKL; Penataan; Penertiban, Pemerintah*

Abstract

This research aims to explore the Probolinggo Governments strategy in organizing the Probolinggo City Government in organizing and managing traders on Jalan Suroyo, Probolinggo City. The method used is descriptive qualitative, the results are in the form of narratives obtained from observations, interviews and documentation, without using statistical data. The research results show that the relocation carried out by the Probolinggo City Government aims to create order in the Jalan Suroyo area, which is an area with law enforcement and orderly traffic. Every individual, including Street Vendors (PKL) is expected to comply with applicable regulations. The street vendors; response to this policy was quite positive, as can be seen from the joint commitment outlined in the Angkringan Center Traders; Declaration. Thus, it can be concluded that the Probolinggo City Government's efforts to organize and manage street vendor order on Jalan Suroyo are considered quite successful.

Keywords: *Street Vendors; Structuring; Order, Government*

PENDAHULUAN

Perekonomian sebagai indikator penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah, karena pembangunan ekonomi tidak hanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga sebagai ukuran keberhasilan pemerintah guna menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Di Indonesia sektor ekonomi informal merupakan salah satu peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian lokal, salah satu bentuk nyata yaitu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Peraturan Presiden Dalam Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Nomor 1, PKL didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menggunakan sarana sementara atau tidak menetap untuk berjualan, termasuk menggunakan fasilitas umum, sosial dan infrastruktur milik pemerintah atau swasta. Keberadaan PKL merupakan hal yang sangat umum ditemukan di berbagai daerah. Para pedagang umumnya tersebar di berbagai ruang publik seperti trotoar, bahu jalan dan kawasan komersial. Keberadaan para Pedagang di berbagai tempat di sisi kota seringkali memberikan akses ekonomi bagi masyarakat, sekaligus sebagai alternatif sumber penghasilan sehari – hari bagi masyarakat yang tidak terakomodasi di sektor formal. Maka dari itu, diperlukan solusi yang juga mengedepankan kemanusiaan karena PKL merupakan aset ekonomi bangsa (Abimanyu, 2023)

Namun, selain manfaat yang timbul dari adanya PKL tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mereka juga kerap menimbulkan permasalahan terkait tata kelola ruang kota, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika dan ketertiban umum. PKL dapat juga dikatakan sebagai penjual liar atau penjual eceran yang seringkali berdagang di lapangan terbuka, trotoar, pinggir jalan, emperan toko dan tempat lain yang sifatnya

sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah (Poerwadarminta, 2014). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh pemerintah belum terlaksana dengan maksimal karena beberapa peraturan mengenai pemberdayaan tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada para pedagang. Strategi pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada PKL belum mempunyai "sense of crisis" dan belum memiliki bentuk ideal untuk diterapkan di lapangan. Tidak heran apabila saat ini bentuk pemberdayaan PKL adalah hanya terbatas pada aspek penertiban saja.

Meskipun membawa dampak negatif, pemerintah berusaha agar PKL tidak dimusnahkan melainkan dibimbing, diatur dan dikembangkan karena peran pedagang tersebut dinilai sangat baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian (Susilowati & Wangi 2017). Masyarakat mengharapkan pemerintah agar dapat memaksimalkan lebih dalam proses pengelolaan dan penertiban PKL. Proses tersebut dapat dilaksanakan dengan langkah awal yakni memberikan dukungan berupa bantuan baik material (modal) maupun non material (keamanan, pelatihan dan pengetahuan kepada PKL). Pedagang yang berada di lingkungan perkotaan sebenarnya telah banyak mendapatkan sentuhan dari kebijakan pemerintah daerah. Usaha ini memiliki pengaruh karena keberadaannya dengan jumlah yang cukup besar mendominasi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat perkotaan. Sebelum dilaksanakan proses relokasi oleh pemerintah Kota Probolinggo keadaan pedagang sangat tidak tertib, karena dengan keberadaan PKL tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya kemacetan di sepanjang Jalan Suroyo tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena para pembeli tidak mendapatkan lahan untuk parkir kendaraan sehingga mereka menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir.

Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Kota yang berkembang berupaya untuk mengelola tantangan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dengan strategi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Probolinggo harus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menjaga ketertiban serta keindahan kota. Dalam hal ini tata kelola tempat dagang menjadi salah satu upaya yang diterapkan di Kota Probolinggo. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Tata kelola yang baik tidak hanya menyangkut penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi yang strategis, teratur dan tidak mengganggu fungsi utama ruang publik tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan seperti pelatihan, keterampilan berwirausaha dan penyediaan fasilitas yang dapat mendukung operasional Pedagang Kaki Lima. Dengan

adanya upaya tersebut diharapkan adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar lebih mampu bersaing dan berkontribusi pada perekonomian Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo telah merancang berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membantu memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan Jalan Suroyo melalui penataan tempat dagang yang lebih tertib. Program yang dibuat berupaya untuk memberikan akomodasi kebutuhan ekonomi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan menyediakan fasilitas berupa tempat dagang yang teratur dengan memperhatikan ketertiban umum. Pemerintah melakukan penataan ulang lokasi yang akan digunakan oleh para pedagang dengan memastikan bahwa mereka dapat melakukan aktivitas jual beli di area yang strategis namun tidak mengganggu lalu lintas dan tidak mengganggu fungsi ruang publik lainnya. Melalui strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan membentuk Kota yang lebih tertib.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan sesuai dengan fakta dan obyek penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai dan memahami bagaimana cara atau strategi pemerintah dalam upaya penataan dan penertiban bagi PKL di Kota Probolinggo. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan mengeksplorasi data secara terkait kebijakan, pelaksanaan, strategi yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam proses penertiban pedagang di kota tersebut. Penelitian dilakukan di empat titik lokasi penempatan PKL yaitu di Depan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Depan Pasar Baru Niaga, Depan Pasar Mangunharjo, dan Pujasera Alun - Alun Kota Probolinggo

Berdasarkan sumbernya, data yang ada dalam penelitian ini ada dua jenis terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi dan melakukan wawancara kepada beberapa pedagang yang mengalami pemindahan lapak, dan juga pengunjung atau pembeli di lokasi penelitian. Sementara data sekunder didapatkan dari beberapa media massa yang mendukung dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo merupakan langkah pemerintah untuk menata kawasan publik khususnya di Jalan Suroyo agar lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan. Pedagang Kaki Lima (PKL) memegang peran penting dalam aspek perekonomian lokal, namun keberadaan para pedagang tersebut kerap kali menimbulkan masalah yang mengganggu para pengguna jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyusun strategi guna menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, Erwan Kiswandoko menyatakan bahwa Jalan Suroyo telah ditetapkan sebagai kawasan yang harus tertib hukum dan lalu lintas, sehingga setiap individu, termasuk PKL harus mematuhi aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban (Probolinggo kota, 2023).

"Kami berusaha membina, menata dan menertibkan PKL dengan menyediakan tempat khusus bagi mereka, terutama untuk PKL Angkringan. Kami telah menyiapkan beberapa lokasi yang lebih baik dan dilengkapi dengan fasilitas air, listrik serta hiburan musik diperbolehkan guna mendukung usaha mereka." Erwan Kiswandoko

Sesuai dengan pernyataan Kabid DKUP Kota Probolinggo, bahwa tujuan dari diadakannya relokasi pedagang ke beberapa tempat yaitu selain menertibkan kawasan di sekitar jalan suroyo juga untuk meningkatkan pendapatan para PKL dengan cara menyediakan tempat yang lebih baik dan memadai yang lengkap dengan air dan listrik serta sarana hiburan musik untuk diserahkan kepada para PKL agar bisa mengadakan hiburan.

Dalam proses relokasi ini pemerintah berupaya membina dan menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan strategi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib sekaligus mendukung Selanjutnya ditegaskan pula bahwa khususnya untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Angkringan telah disediakan tempat khusus untuk aktivitas perdagangan. Strategi yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Probolinggo telah memfasilitasi 47 PKL di sepanjang Jalan Suroyo kemudian menentukan area untuk disinggahi para PKL sehingga mengurangi dampak pada lalu lintas dan kenyamanan publik. Adapun lokasi - lokasi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Depan Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL)



Gambar 1.1 TWSL

Sumber : Radar Bromo

Pemerintah Kota Probolinggo memutuskan untuk memilih Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) sebagai salah satu lokasi wisata pendidikan karena lingkungannya yang hijau dan asri. Dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke sana, pemerintah ingin memberi pengunjung kesempatan untuk menikmati makanan sembari menikmati pemandangan di sekitar TWSL. Hal ini akan menguntungkan bagi pedagang karena para pengunjung TWSL sedikit banyak akan membeli dagangan mereka. Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke tempat yang lebih teratur dapat membantu memperbaiki estetika kota dan mengurangi kemacetan di area Kota Probolinggo, ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali area pusat kota yang padat. Relokasi ini menjadi strategi Pemerintah Kota Probolinggo untuk merapikan tata letak kota dan tetap mendukung penjualan dari Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Depan Pasar Baru Niaga



Gambar 1.2 Pasar Baru Niaga

Sumber : Radar Bromo

Lokasi berikutnya yang menjadi tempat relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah di sekitar area Pasar Baru Niaga. Karena fasilitas - fasilitas yang ada di Pasar Baru Niaga sudah tersedia dan memadai seperti, adanya lahan parkir untuk meminimalisir terjadinya kemacetan lalu lintas, fasilitas kebersihan guna menjaga lingkungan dari sampah - sampah yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pengunjung dan keamanan yang mencukupi. Dengan merelokasi Pedagang

Kaki Lima (PKL) ke area Pasar Baru Niaga, Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengawasi dan mengelola aktivitas perdagangan yang dekat dengan kantor walikota sehingga menjadi lebih teratur dan efisien.

3. Depan Pasar Mangunharjo



Gambar 1.3 Pasar Mangunharjo

Sumber : Jatim Net

Alasan Pemerintah Kota Probolinggo merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Depan Pasar Mangunharjo merupakan keputusan yang tepat. Melihat potensi dari Pasar Mangunharjo yang menjadi pusat perekonomian dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga memudahkan para pengunjung untuk mengetahui lokasi PKL yang baru, serta fasilitas yang disediakan di Pasar Mangunharjo juga sangat memadai. Selain itu, lokasi ini juga menyediakan ruang yang lebih strategis dan terorganisir, sehingga para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak perlu khawatir tentang masalah parkir dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kota Probolinggo berharap dengan pemilihan lokasi di Pasar Mangunharjo dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, kenyamanan PKL dan pengunjung, dan tetap menjaga keindahan tata letak kota.

4. Pujasera Alun – Alun Kota Probolinggo



Gambar 1.4 Pujasera Alun – Alun

Sumber : tadatodays

Lokasi terakhir yang menjadi pilihan dari Pemerintah Kota Probolinggo terletak di area yang sangat strategis berada di tengah Kota Probolinggo yaitu Pujasera Alun - Alun. Selain lokasi yang strategis, alun - alun juga menjadi tempat orang berkumpul untuk bersantai dan berolahraga. Dengan Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pujasera Alun - Alun, target

pengunjung bukan hanya masyarakat lokal tetapi masyarakat dari luar daerah bahkan wisatawan asing dapat mencoba kuliner – kuliner khas dari Probolinggo. Secara keseluruhan, relokasi ke kawasan Pujasera Alun – Alun untuk mewujudkan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, teratur, dan nyaman bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengunjung.

Pemerintah Kota Probolinggo juga membuat komitmen dan kesepakatan dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendukung upaya penataan kota yang dilakukan oleh pemerintah kota Probolinggo dan siap mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan tertib. Pedagang Kaki Lima (PKL) juga mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan menciptakan kawasan tertib lalu lintas dan tertib hukum di Jalan Suroyo dan sekitarnya. Atas dasar kesadaran ini, Pemerintah Kota Probolinggo dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menyatakan komitmen bersama yang tercantum di bawah ini dalam Deklarasi Pedagang Sentra Angkringan :

1. Bahwa Kami dan seluruh Eks PKL Angkringan Suroyo mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka penataan dan penertiban kawasan Jalan Suroyo menjadi kawasan tertib lalu lintas dan kawasan tertib hukum, serta menjadikan Kota Probolinggo lebih indah dan tertata.
2. Bahwa Kami berjanji tidak akan melakukan aktivitas perdagangan kembali sebagai PKL Angkringan di kawasan jalan suroyo dan sekitarnya atau dikawasan yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Bahwa Kami siap menerima sanksi apabila Kami melanggar surat perjanjian dan deklarasi ini.

Dalam Deklarasi Sentra Angkringan tersebut, Pedagang Kaki Lima (PKL) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk menciptakan kawasan yang tertib lalu lintas dan hukum di Jalan Suroyo, serta berjanji untuk tidak kembali berdagang di kawasan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah.

B. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo membawa dampak yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pelaksanaan relokasi ini tidak hanya berkaitan dengan penataan ulang ruang publik, tetapi juga membawa dampak terhadap kesejahteraan PKL dan masyarakat secara menyeluruh. Dibawah ini adalah beberapa dampak yang muncul dari pelaksanaan relokasi tersebut:

1) Pedagang Lebih Tertata dan Teratur

Salah satu dampak dari pelaksanaan penataan dan penertiban PKL ini yakni terciptanya ketertiban di ruang publik yang sebelumnya digunakan untuk berdagang secara

tidak teratur. Sebelum adanya relokasi ini, banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan lapak/gerobak di area yang tidak semestinya seperti trotoar, bahu jalan dan lokasi lainnya yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat untuk kepentingan umum. Hal tersebut sering kali menimbulkan kekacauan bagi masyarakat secara luas. Dengan memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke lokasi yang lebih tertata dan sesuai dengan peruntukan tata ruang kota, pemerintah akhirnya berhasil mengurangi kekacauan yang kerap terjadi di jalan utama yang menjadi jalur penting bagi mobilitas warga setiap hari.

Relokasi ini juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi lalu lintas karena dapat membantu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang sering disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Dengan relokasi ini, akhirnya jalan utama kini terbebas dari hambatan yang ditimbulkan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga arus lalu lintas lebih lancar dan nyaman bagi pengguna jalan. Ketertiban ini menciptakan dampak positif pada kelancaran aktivitas masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan kota yang lebih teratur dan tertib.

2) Peningkatan Aksesibilitas Publik

Proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke area yang lebih tertata ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan zona khusus PKL, sehingga para pedagang dapat menjalankan aktivitas jual beli tanpa mengganggu lalu lintas ataupun merusak estetika kota. Berbagai kebijakan dari Peraturan Daerah dan keputusan dari dinas terkait menjadi landasan hukum dalam hal penertiban ini. Dengan demikian, para pedagang ataupun masyarakat dapat menikmati dan merasakan manfaat dari lingkungan kota yang nyaman, tertib dan tertata.

Peningkatan aksesibilitas publik dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Probolinggo melibatkan beberapa strategi penting. Salah satunya adalah penambaham fasilitas di Alun-Alun Kota Probolinggo yang berupa "Pujasera" untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pengunjung, sehingga membantu para pelaku UMKM khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk meningkatkan serta mempertahankan usahanya.

3) Penguatan Ekonomi Lokal

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memberikan manfaat signifikan bagi penguatan ekonomi lokal jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang tepat. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya lingkungan perdagangan yang lebih tertata, yang dapat menarik lebih banyak konsumen, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan. Lokasi yang lebih strategis dan teratur sering kali mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sekitarnya, di mana para pedagang dapat menikmati pasar yang lebih

luas dan stabil. Dengan akses ke fasilitas yang lebih baik seperti tempat parkir, sanitasi, dan infrastruktur penunjang, daya tarik tempat relokasi juga dapat meningkat, menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi baru. Selain itu, relokasi yang berhasil juga membuka peluang untuk pengembangan sektor informal menjadi lebih formal, di mana PKL dapat difasilitasi untuk mengurus izin usaha, mendapatkan akses kredit, serta mengikuti program pelatihan keterampilan. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat daya saing mereka dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

Relokasi PKL yang terencana dengan baik juga berdampak positif pada integrasi ekonomi lokal dengan sektor lain, seperti pariwisata dan jasa. Lokasi yang bersih, teratur, dan dikelola dengan baik mampu meningkatkan citra daerah, menjadikannya lebih menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman kuliner atau membeli produk lokal. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan PKL secara langsung, tetapi juga mendorong perputaran uang di ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi. Selain itu, dengan penataan ruang kota yang lebih baik akibat relokasi, pemerintah daerah juga bisa lebih mudah mempromosikan kawasan tersebut sebagai pusat bisnis atau pasar lokal yang dinamis, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Pada akhirnya, relokasi PKL yang sukses dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta menggerakkan roda ekonomi di tingkat komunitas, sehingga berdampak pada penguatan ekonomi lokal secara keseluruhan.

C. Tantangan Dalam Relokasi

Pemerintah menghadapi beberapa tantangan dalam upayanya mengatur dan menata pedagang kaki lima (PKL) di kota Probolinggo. Beberapa tantangan utama tersebut meliputi:

1) Resistensi Pedagang

Banyak pedagang yang merasa nyaman dengan lokasi saat ini dan khawatir kehilangan pelanggan jika pindah ke tempat yang baru. PKL umumnya sudah memiliki basis pelanggan yang kuat di lokasi lama dan seringkali relokasi ini dianggap mengancam keberlangsungan usaha mereka. Relokasi bisa berdampak pada pendapatan pedagang, terutama jika lokasi baru tidak sama ramainya. Ketersediaan infrastruktur di lokasi baru, seperti listrik, air, dan akses jalan, sangat penting untuk kelancaran usaha.

2) Kurangnya Alternatif lokasi berdagang

Pemerintah seringkali kesulitan menyediakan lokasi yang strategis dan tepat bagi PKL. Lokasi alternatif yang tidak ramai atau jauh dari pusat aktivitas ekonomi seringkali menyebabkan penurunan jumlah pelanggan, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan para pedagang. Toko-toko alternatif yang ditawarkan mungkin tidak dapat

diakses oleh konsumen dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang kaki lima.

3) Tekanan Sosial dan Ekonomi

Pedagang Kaki Lima kebanyakan berasal dari keluarga berpenghasilan menengah kebawah yang mengandalkan usaha kecil tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tindakan penegakan hukum apa pun yang dianggap mengurangi pendapatan mereka dapat menimbulkan protes sosial dan tekanan politik terhadap pemerintah.

SIMPULAN

Upaya dari pemerintah kota dalam menciptakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo dengan membuat keputusan terkait pemindahan lokasi atau relokasi tempat PKL. Dalam keputusan tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menyediakan lahan untuk lokasi PKL yang sangat strategis seperti, Depan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Depan Pasar Baru Niaga, Depan Pasar Mangunharjo, dan Pujasera Alun - Alun, sehingga memudahkan akses untuk dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. selain lokasi yang strategis, pemerintah menyediakan fasilitas yang berguna bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pengunjung seperti, adanya area parkir, fasilitas kebersihan, dan keamanan yang mencukupi. Maka dari itu, relokasi PKL yang baik sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki tata letak kota, dan memberikan kenyamanan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Waterfront Kota Pontianak) . *(Doctoral Dissertation, IPDN)*.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2014). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Ketiga). Balai Pustaka.
- Probolinggo kota. (2023). *Relokasi Angkringan Pemkot Siapkan Lokasi Baru yang Lebih Estetik*. *Retrevid October 02,2024 From*. <https://Probolinggokota.Go.Id/Berita-1-2/2023/Relokasi-Angkringan-Pemkot-Siapkan-Lokasi-Baru-Yang-Lebih-Estetik>.
- Rusdiananingtyas, E. dkk. (2006). Implementasi Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1898–1904.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, N. , & W. N. B. S. (2017). *Kewirausahaan*. Ahlimedia Book.

- Wrihatnolo, Randy R., & Rian Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elex Media Komputindo.
- Zimmerman. (2000). *Empowerment Theory: Psychological, Organizational and community levels of analysis*. In *Handbook of Community Psychology*; Rappaport, J., Seidman, E., Eds.; Kluwer Academic/Plenum. New York, NY, USA.